



International e.V.

Annual Narrative Report

January – December 2024

**(Innovative and inclusive approach towards
Social & Economic Reintegration for Migrant
Workers Communities in Lombok Timur)**

(Reported by ADBMI Foundation)



Ringkasan Laporan Proyek ADBMI Tahun Pertama

Pada tahun pertama pelaksanaan proyek tiga tahun, ADBMI berhasil mencapai berbagai capaian penting dalam memperkuat perlindungan dan reintegrasi sosial-ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya di Lombok Timur.

Capaian Utama

- Berhasil mendorong lahirnya **Peraturan Bupati Lombok Timur No. 79 Tahun 2024**, regulasi pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan sosial-ekonomi PMI dan keluarganya.
- Membentuk **4 Lembaga Sosial Desa (LSD)** di Desa Menceh, Borok Toyang, Telagawaru, dan Kalijaga Timur sebagai garda terdepan perlindungan PMI di tingkat desa.
- Mengembangkan **LaporBUP**, sistem pelaporan kasus PMI berbasis daring yang memperkuat koordinasi antarinstansi.
- Memberikan konseling ketahanan keluarga kepada **lebih dari 300 keluarga PMI** bekerja sama dengan HIMPSI NTB.
- Menyusun **roadmap reintegrasi sosial-ekonomi** di empat desa dampingan dan membangun basis data PMI berbasis desa.
- Menghidupkan kembali tradisi **BANJAR** sebagai mekanisme dukungan sosial bagi PMI dan keluarganya.

Perkembangan Kebijakan

- Pemerintah Indonesia membentuk **Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**, merevisi sejumlah kebijakan ketenagakerjaan, serta memberikan kemudahan pengiriman barang bagi PMI.
- Di Lombok Timur, ADBMI berhasil menginisiasi dan mengadvokasi kebijakan daerah yang memperkuat perlindungan PMI hingga tingkat desa.

Tantangan

Pelaksanaan proyek menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- kondisi ekonomi pascapandemi,
- perubahan kebijakan migrasi,
- tingginya angka migrasi nonprosedural,
- keterbatasan infrastruktur dan literasi digital,
- stigma terhadap PMI purna,
- koordinasi lintas pemangku kepentingan,

- serta potensi bencana alam di Lombok Timur.

Kolaborasi

ADBMI bekerja sama dengan pemerintah daerah, Disnaker, BP3MI, DP3AKB, BAZNAS, Dinas Sosial, HIMPSI, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, rumah sakit, kepolisian, pemerintah desa, BUMDes, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sistem perlindungan PMI.

Pendekatan Program

Program mengintegrasikan isu lintas sektor seperti:

- inklusi penyandang disabilitas,
- pengurangan kemiskinan,
- kesetaraan gender,
- pelibatan pemuda,
- prinsip *Do No Harm*,
- kesiapsiagaan bencana,
- serta pelestarian kearifan lokal melalui sistem BANJAR.

Dampak yang Diharapkan

Melalui penguatan kebijakan, kelembagaan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, dan kolaborasi multipihak, proyek diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan PMI yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan keluarga migran, serta berkontribusi pada pencapaian beberapa **Sustainable Development Goals (SDGs)**, terutama pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, dan penguatan kelembagaan.